

KEGIATAN DPR-RI PERTENGAHAN FEBRUARI 2012

Kegiatan DPR-RI pertengahan Februari 2012 tetap diwarnai oleh berbagai kegiatan bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pertengahan Februari ini, Dewan memulainya dengan Rapat Paripurna tanggal 7 Februari 2012. Dalam Rapat paripurna ini, memutuskan menyetujui hasil pemilihan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK Pengganti) yang telah dilakukan oleh Komisi III. Dengan mempertimbangkan Pasal 21 ayat (1) UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka DPR telah menyetujui 2 orang calon dari 6 calon yang telah dilakukan *fit and proper test* Komisi III melalui pemungutan suara. Calon yang telah disetujui yaitu: Tasman Gultom, SH. AAI.K dan Hotma David Nixon, SH. M.Hum. Calon-calon yang telah ditetapkan, akan disampaikan kepada Presiden untuk disahkan sebagai anggota LPSK. Dalam Rapat Konsultasi Pengganti

juga telah menyetujui penanganya yaitu: Keputusan DPD-RI No. 16, 2012. tentang hasil pengan Lahan Pertanian Pangan Komisi IV untuk ditindaklanjuti; lenggaraan Ibadah Haji Tahun Komisi VIII; atas pelaksanaan rahkan kepada komisi X. Surat 2012 tentang RUU Minyak dan Komisi VII dan tentang Penem-Kerja Indonesia di luar nege-

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Ali



PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Komisi III dalam Rakernya dengan Kapolri, Rabu (01/02) menyimpulkan bahwa Komisi III mendesak Kapolri untuk proaktif memberi masukan dalam pembahasan RUU tentang Keamanan Nasional dan Komisi III akan mengupayakan agar pembahasan RUU tersebut dilakukan oleh gabungan Komisi I dan Komisi III DPR.

Panitia Kerja RUU tentang Pemilu menyepakati sejumlah pasal mengenai tahapan persiapan Pemilu Legislatif 2014, antara lain menyangkut waktu kampanye, penyusunan DCT, serta pemutakhiran daftar pemilih. Dalam hal persiapan kampanye, partai-partai sudah dimulai pada Januari

Bamus pada 6 Februari, fraksi-fraksi surat-surat masuk dari DPD-RI, No. 18, dan No. 19/DPD-RI/2011-wasan DPD-RI atas Perlindu-Berkelanjutan diserahkan kepada atas pengawasan tentang Penye-2011/1432 H diserahkan kepada UU tentang Kepariwisata disepan DPD No. 15 dan 17/DPD-RI/2011-Gas Bumi diserahkan kepada pahan dan Perlindungan Tenaga ri diserahkan kepada Komisi IX.

2013-April 2014. Bentuk kampanye terdiri dari dialogis dan sosialisasi yang dilakukan oleh partai. Kampanye akbar, penerahan massa, dan kampanye calon legislatif dilaksanakan awal Maret-April 2014, sekitar 21 hari dengan masa tenang 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Panitia kerja telah menyepakati sejumlah poin, berkaitan dengan penyediaan data dan pemutakhiran data pemilih diberi rentang jarak waktu 8 bulan, Maret-Oktober 2013.

Fraksi-fraksi dalam Pansus ini setuju terhadap wacana pembatasan dana kampanye. Dukungan terhadap pembatasan dana kampanye disuarakan oleh berbagai fraksi yang intinya adalah dana kampanye harus dibatasi dengan alasan [1] untuk memperkecil peluang *money politics*, [2]

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

menghasilkan kampanye yang lebih berorientasi pada program, [3] menekan pemborosan atribut yang tidak terkendali, [4] mencegah terjadinya jor-joran yang menghabiskan anggaran untuk pemenangan, dan [5] tidak membuka peluang persaingan yang tidak sehat karena kekuatan modal. Pembatasan dana kampanye bisa dilakukan pada pos penerimaan maupun belanja untuk mencegah aliran dana terselubung yang masuk ke Parpol.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Komisi I DPR-RI pada Rakernya dengan Menteri Perumahan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Panglima TNI (30/01) antara lain menyimpulkan bahwa Komisi I meminta Pemerintah; menyelesaikan program sertifikasi tanah negara yang dipergunakan TNI dengan skala prioritas. Terhadap tanah-tanah yang tidak bermasalah, segera diselesaikan, dengan menetapkan anggaran pada Pos BPN-RI atau kemenhan RI; memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan sarana perumahan dan asrama prajurit.

Pada hari Selasa (24/01), Komisi IV DPR-RI melakukan Raker dengan Menteri Kehutanan-RI dengan agenda antara lain: evaluasi pelaksanaan APBN 2011 dan rencana kerja anggaran 2012, evaluasi dan progres report penanganan 1 miliar pohon, dan isu-isu aktual bidang kehutanan lainnya. Dalam bidang pengawasan, kesimpulan Raker tersebut antara lain Komisi IV mendesak kepada Pemerintah agar: dalam waktu singkat menyelesaikan berbagai kasus sengketa lahan dalam kawasan hutan, khususnya di daerah Pulau Padang di Riau, Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan berbagai tempat lainnya; dan menindak tegas pelaku *illegal logging*, khususnya di Riau (Pulau Padang) dan di Kalimantan Selatan (Tanah Bambu).

Komisi VII pada Raker, senin (30/01), dengan menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dengan agenda membahas rencana pengaturan pembatasan BBM bersubsidi tahun 2012, antara lain menyimpulkan bahwa Komisi VII meminta pemerintah untuk mempersiapkan; [1] *roadmap* percepatan pembangunan infrastruktur BBM non-subsidi serta kebijakan insentif terkait; [2] rencana terpadu percepatan program konversi BBM ke BBG, meliputi penyiapan alokasi gas, pipanisasi, SPBG, dan *converter kit*; [3] rencana alokasi anggaran hasil penghematan subsidi BBM untuk percepatan pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur transportasi publik yang nyaman bagi masyarakat; [4] program kerja TKP4BBM dalam rangka mengawal penggunaan BBM berdistribusi agar tepat sasaran. Selain itu, Komisi VII akan mengagendakan Raker dengan Menteri ESDM, Menkeu, BPH Migas dan Pertamina untuk membahas realisasi BBM bersubsidi tahun 2011 yang mengalami over kuota.

Pada Selasa (24/01), Komisi VIII DPR-RI telah melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan penguatan koordinasi lintas sektor pemberdayaan perempuan dan perlin-



ngan anak dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Dalam pembahasan tersebut, Komisi VIII memberikan beberapa catatan dan penekanan penting kepada Pemerintah untuk segera ditindaklanjuti, antara lain yaitu: agar lebih responsif terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai bidang, pengarusutamaan keluarga menjadi sebuah perspektif yang harus dipertimbangkan dan strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan penguatan gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) melalui koordinasi pusat dan daerah sebagai upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang (*trafficking*) dengan memprioritaskan daerah perbatasan.

Rapat Gabungan Komisi II, III dan VIII dengan Menko Kesra, Menteri Agama, Mendagri, Gubernur Jabar dan Walikota Bogor, 8 februari 2012 menyimpulkan bahwa dalam waktu sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan GKI Yasmin Bogor secara tuntas dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat yang terkait demi terwujudnya kehidupan kemasyarakatan yang aman, tenteram, dan damai.

Untuk kegiatan Tim Pengawas Kasus Bank Century tanggal 26 Januari 2012 dengan Robert Tantular dan Lucas SH (mantan pengacara Rafat Ali Rizvi), menyimpulkan bahwa Timwas Century: [1] meminta kepada Lucas SH, untuk memfasilitasi agar Timwas century dapat diberikan testimony dari Rafat Ali Rizvi terkait kasus bank century yang akan dijadikan novum baru, [2] akan menyampaikan masalah Robert tantular terkait perkara yang dicicil-cicil oleh pengadilan kepada Komisi III Dpr-RI untuk ditindaklanjuti, dan [3] menyetujui akan mengundang Mantan komisaris dan direksi bank century, sdr. Hermanus Hasan Muslim dan Sunaryo Sampurno terkait dengan kasus Bank Century. Sementara, Rapat Konsultasi Timwas Kasus Bank Century tanggal 1 Februari 2012

dengan BPK-RI, Timwas Kasus Bank Century mengapresiasi hasil Audit Investigasi Lanjutan yang dilakukan BPK yang memperkuat hasil Audit Investigasi sebelumnya yang mengungkap adanya dugaan kerugian keuangan negara. Pada Rapat dengan Jaksa Agung pada 8 Februari 2012, disimpulkan bahwa Timwas century: [1] memberikan apresiasi terhadap penanganan penegakan hukum kasus Bank Century yang dilakukan kejaksaan Agung dan mendorong unruk percepatan proses *asset recovery* yang ditargetkan selesai pada akhir 2012 dan menentukan langkah kongkrit penanganan yang dituangkan dalam suatu *term of reference* secara rinci dan realistis mengenai waktu dan jumlah aset yang mungkin diperoleh, [2] mendesak Kejagung untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap otoritas moneter atau BI yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum serta pelanggaran ketentuan UU Perbankan. Terkait kasus Hesham al Warraq, rafat Ali Rizfi dan Robert Tantular, berkoordinasi dengan KPK dan kepolisian, [3] mendesak Kejagung agar segera melakukan koordinasi dengan KPK untuk emnangani pemeriksaan terhadap oknum LPS berdasarkan temuan Audit Investigasi tahap pertama BPK No. 6.



PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Kegiatan bidang anggaran dalam minggu-minggu ini, Komisi-Komisi DPR tetap melakukan Raker dengan Pemerintah/pasangan kerja. Komisi I DPR-RI pada rakernya dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Panglima TNI (30/01) menyimpulkan antara lain terkait dengan surat Menkeu No. S-760/MK.02/2011 tanggal 20 september 2011 dan No. S-760/MK.02/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Permohonan Penghapusan Dana Bertanda Bintang Anggaran PLN/KE. Komisi I melalui Panja Alutsista akan membahasnya bersama dengan Tim HLC (High level Committe) dalam Masa Sidang III tahun 2011-2012, dan hasil pembahasan ini dilaporkan dalam Raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI untuk mendapat persetujuan.

Komisi III dalam Rakernya dengan Kapolri, Rabu (01/02) menyimpulkan bahwa Komisi III: akan mengupayakan peningkatan anggaran agar terpenuhi kebutuhan anggaran yang optimal bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan Polri; mendesak Kapolri agar konsisten dan terarah merealisasikan Anggaran Polri 2012 untuk memelihara Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum yang obyektif dan keamanan nasional.

Komisi IV dalam Raker-nya dengan Kementerian Kehutanan (24/01) antara lain: mengapresiasi atas serapan APBN 2011 sebesar 87,60% dari total Pagu APBN 2011; mengapresiasi tindak lanjut Kemenhut-RI terhadap temuan BPK pada laporan keuangan semester I tahun 2011. Namun demikian, Komisi IV tetap meminta kepada Pemerintah agar penyerapan tahun 2011 diatas 95% dan menyelesaikan berbagai temuan BPK yang belum tuntas.

Komisi X dalam Rakernya dengan Kepala BP-POM menyimpulkan di bidang anggaran antara lain: [1] berdasar pasal 98 ayat (3a) UU tentang MD3, dalam rangka pengawasan maka kebijakan umum DAK Pendidikan dikomunikasikan dengan Komisi X DPR-RI; mengingat DAK bidang pendidikan terkait dengan anggaran fungsi pendidikan, Komisi X menghibau agar petunjuk teknis harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan TA 2012 harus lebih baik dari TA 2011; dan program sarana peningkatan mutu pendidikan yang dibiayai melalui DAK pendidikan harus ada kesinambungan dari jenjang SD ke SMP diantaranya program Penjaskes.

KONFERENSI PUIC KE-7 DI PALEMBANG

Dalam Konferensi PUIC ke-7, ketua DPR telah menerima kunjungan kehormatan dalam forum *billateral meeting* dari ketua-ketua parlemen/ketua delegasi yang hadir dalam sidang IPU ke-7. Delegasi dimaksud adalah Ketua Parlemen Persatuan Emirat Arab, Ketua Parlemen Lebanon, Ketua



Parlemen Turki, Ketua Parlemen Pakistan, Ketua Perlemen Iran, Wakil Ketua Parlemen Irak, Ketua Parlemen Albania, Wakil Sekretaris Jendral APA, Delegasi Perlemen Srilangka, dan Ketua Parlemen Qatar. Pada umumnya, pimpinan delegasi tersebut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Sidang PUIC, terutama yang berkaitan dengan substansi materi yang dibahas dan penyelenggaraannya.

Ketua Parlemen UEA Y.M. Mohammed Ahmed Al Mur, mengatakan bahwa peran Indonesia di kancah politik internasional menarik perhatian negara-negara Islam, khususnya di Timteng. Keluwesan Indonesia dalam berhubungan dengan pimpinan negara AS maupun Eropa, membuat negara-negara di Timteng melihat, Indonesia memiliki potensi sebagai penghubung/jembatan Islam dan dunia Barat. Dengan menjadikannya Indonesia Presiden PUIC, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam pertemuan-pertemuan dengan parlemen Eropa maupun Amerika Serikat, bahkan dengan pimpinan negara-negara Barat yang sering berkunjung ke tanah air. Ketua Perlemen UEA berkeinginan Indonesia menjadi duta untuk memberikan citra positif agar stigma Islam yang selama ini identik dengan terorisme dapat dihilangkan.

Ketua Parlemen Pakistan Mrs. Fehmida Mirza, mengatakan kebanggaannya atas keberhasilan Indonesia untuk menghadirkan banyak delegasi di dalam Sidang PUIC dari berbagai spektrum kepentingan dibawah satu atap. Ketua Parlemen Pakistan memuji keberhasilan pemerintah dan

parlemen Indonesia dalam mengelola keanekaragaman dan multikulturalisme di Indonesia, hal mana direfleksikan dengan baik pada Pidato Presiden RI dan Pidato Ketua DPR-RI selaku presiden PUIC ke-7. Ketua delegasi Pakistan mengharapkan agar PUIC dapat ditingkatkan daya tawarnya melalui kerjasama yang lebih kongkrit dan strategis antar parlemen negara anggota OKI, akan diupayakan agar PUIC mendapat tempat sebagai pemantau (observer), bukan hanya di IPU tapi juga di PBB.

Sementara itu, Ketua DPR-RI pada pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran Mr. Ali Larijani, menyampaikan bahwa semua pihak di Indonesia mengikuti dengan prihatin dan cemas perkembangan di Suriah dengan semakin banyaknya korban sipil/rakyat biasa. Selain itu, memanasnya situasi di Selat Hormuz dikhawatirkan memicu naiknya harga minyak dunia yang berakibat langsung secara fatal kepada perekonomian global, termasuk di Indonesia. Disampaikan harapan, agar pasokan minyak dunia yang melalui Selat Hormuz tidak mengalami gangguan blokade. Terkait tawaran Iran untuk Indonesia menjadi tuan rumah APA, Ketua DPR menyampaikan bahwa jadwal dan agenda persidangan DPR dan BKSAP tahun 2012 ini, DPR belum dapat menerima tawaran tersebut karena kekhawatiran tidak dapat optimal dalam menjalankan tanggungjawab tersebut. DPR RI menyerahkan kepada forum melalui mekanisme persidangan reguler dalam memilih pengganti Suriah, dan dapat menerima Negara manapun yang ditetapkan untuk memimpin APA.

Komisi III Gelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota LPSK Pengganti

Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan 6 orang calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dua orang terpilih nantinya akan menggantikan posisi dua anggota LPSK sebelumnya yaitu Ketut Sudiarsa dan Myra Diarsi yang diberhentikan dengan tidak hormat karena terkait kasus Anggodo Widjojo.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Nasir Djamil

“ Kita mencari dua orang kandidat tidak sekedar memiliki keberanian tapi juga paham melihat grafik kejahatan terutama kerah putih kemudian kejahatan yang sifatnya kriminal yang cenderung meningkat. Mereka harus mampu memberi perlindungan kepada whistle blower dan justice collaborators untuk mengungkap kejahatan yang terjadi,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Nasir Djamil kepada wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/12).

Ia berharap enam kandidat yang berasal dari beragam latar belakang ini dapat memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Mereka adalah Ahmad Taufik (wartawan), Ade Paul Lukas (advokat), Ermansjah Djaja (konsultan), Edisius Riyadi (akademisi), Hotma

David Nixon (advokat), Lily Dorianty Purba (konsultan), Masruchiyah Nieke (akademisi) dan Tasman Gultom (advokat).

Proses uji kepatutan dan kelayakan menurut politisi PKS ini akan berlangsung satu hari penuh. Dijadwalkan malam nanti Komisi III sudah dapat memutuskan dua orang anggota LPSK pengganti terpilih. “Malam ini kita akan langsung rapat pleno dan menetapkan dua kandidat terpilih,” imbuhnya.

Nasir menambahkan tidak seperti anggota LPSK sebelumnya yang bertugas selama 5 tahun, dua anggota pengganti ini hanya akan menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya yaitu sampai tahun 2013 nanti. Berarti dua anggota baru ini hanya memiliki masa kerja selama 1,5 tahun. (iky) foto:parle



Komisi I DPR RI Bahas RUU Keamanan Nasional

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membahas RUU Keamanan Nasional, menerima masukan dari beberapa pakar, RUU Keamanan Nasional usul inisiatif Pemerintah, terdiri atas VII Bab dan 60 Pasal.



Rapat dengar pendapat umum komisi I DPR dengan jajaran praktisi akademisi membahas RUU Keamanan Nasional

Hadir Prof. (Ris) Hermawan Sulisty, MA.APU, DR.Arry Bainus, MA (UNPAD), DR. Ludiro Madu, M.Si, dalam Rapat dengar Pendapat Umum yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin, (6/2).

Menurut Ludiro Madu (UPN Veteran Yogyakarta), RUU Kamnas bertujuan untuk melakukan penataan atas keberadaan, fungsi, dan kinerja aktor alat Negara di bidang keamanan. Di harapkan bersifat integrative dan komprehensif terhadap dan menjadi dasar pijakan bagi beberapa UU yang ada sebelumnya.

Hal ini akan menyangkut sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undang yang berkaitan dengan

keamanan nasional. “Apakah dengan adanya RUU Kamnas nanti akan merevisi UU yang sudah ada sebelumnya, seperti UU No.3 Tahun 2002 tentang Keamanan Negara, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, dan UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ?,” ungkap Ludiro Madu.

Dia mengatakan RUU ini harus mengatur keseragaman diantara alat Negara di bidang keamanan yang menunjukkan perbedaan posisi. Kenyataan bahwa TNI berada dibawah suatu kementerian, dan Polri langsung Presiden. Aspek kesamaan posisi TNI dan Polri, dimaksudkan agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi, baik dalam partisipasi pengambilan kebijakan dan strategi, maupun upaya operasional

penyelenggaraan keamanan nasional.

Menurut Hermawan Sulisty (LIPI) memberikan pandangannya untuk sebaiknya lebih dahulu merevisi UU Keamanan Negara, UU Polri dan UU TNI. Lebih lanjut mengusulkan bahwa RUU Kamnas tersebut dikembalikan kepada Pemerintah untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan ke-tiga UU tersebut.

Arry Bainus (Unpad) dengan tegas meminta agar DPR mengembalikan RUU Kamnas kepada Pemerintah untuk diperbaiki dan disesuaikan dan segera merevisi ketiga UU itu.

Beberapa anggota Komisi I sependapat untuk mengembalikan UU kamnas kepada Pemerintah dengan argumentasi yang menguatkannya. (as) foto:parle

Selidiki 2 Tahanan Gantung Diri, Komisi III Datangi Polsek Sijunjung

Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Nasir Djamil (F-PKS) dengan anggota Edy Sadeli (F-PD), Nudirman Munir (F-PG), Adang Darajatun (F-PKS), dan Martin Hutabarat (F-Gerindra) ini melakukan penyelidikan terkait kasus kematian dua orang tahanan kakak-beradik Faisal Akbar (14) dan Budri M.Zen (17) di dalam kamar mandi tahanan Polsek Sijunjung, yang terjadi pada 28 Desember 2011 lalu dengan mengunjungi markas Polda Sumatera Barat (27/1).



Ketua Tim Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Sijunjung

Ketua Tim Nasir Djamil mengatakan tujuan kunjungan Komisi III ke Kabupaten Sijunjung adalah untuk melakukan penyelidikan terkait kasus kematian dua tahanan kakak beradik tersebut, di mana hasil temuannya akan diolah kembali oleh Komisi III DPR dalam rapat pleno, kemudian akan membuat rekomendasi kepada Kapolri. “Komisi III saat ini ma-

sih melakukan penyelidikan, apakah ada kekerasan fisik yang dialami korban sebelum korban tersebut meninggal,” ujar Nasir Djamil.

Nasir Djamil mengapresiasi Kapolsek Sijunjung AKBP. Sumarto atas informasi yang disampaikan kepada Komisi III, terkait hasil pemeriksaan fakta kasus kematian dua tahanan tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui

fakta yang terjadi dan terhindar dari kesimpangsiuran atas kasus tersebut. Dia mengharapkan, kepolisian bisa mendesain kembali ruangan tahanan agar lebih nyaman. Kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja, keahlian, profesionalisme, dan tingkah laku agar dapat lebih dipercaya oleh masyarakat.

Kapolda Sumatera Barat Brigjen Pol. Wahyu Indra mengakui adanya kelalaian dari petugas ruang tahanan Polsek Sijunjung, sehingga menyebabkan kedua anak itu tewas di dalam tahanan. “Saya minta maaf kepada masyarakat atas kelalaian anggota saya,” ujarnya. Wahyu mengaku pihak kepolisian telah menyerahkan hasil otopsi korban kepada Komisi III DPR sebagai bukti bahwa tidak ada rekayasa dalam kematian Faisal dan Budri yang memang gantung diri. (Roy/Tvp)

Mulai Tahun ini Bulog Tidak Akan Melakukan Impor Beras Lagi

Komisi IV DPR mendukung program BULOG bahwa mulai tahun ini tidak akan melakukan impor beras lagi. Demikian yang dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo pada saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Alimuso. Rapat tersebut dilakukan di Gedung DPR Senayan Jakarta Pusat, Kamis, (8/2) siang.

Wakil ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menambahkan, untuk selanjutnya Perum BULOG harus bisa bersinergi dalam program tersebut berkaitan dengan penyerapan beras dalam negeri, serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu dengan cara beras petani tidak dibeli oleh tengkulak.

Dalam hal ini Perum BULOG telah menargetkan pengadaan beras dalam negeri tahun 2012 sebesar 4.100.000 ton, yang berarti benar-benar BULOG tidak akan melakukan impor beras lagi, kecuali dari carry over tahun 2011 impor sebesar 560.000 ton.

Berdasarkan data dari Ditjen Tanaman Pangan pada periode Februari-April 2012 terjadi panen raya menghasilkan produksi padi 28,26 juta ton GKG, dengan surplus beras 4,523 juta ton. BULOG juga harus bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan program Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, Peningkatan kesejahteraan petani kecil dan menengah.

Mengamati hasil produksi padi/beras nasional, Komisi IV DPR mengapresiasi realisasi produksi beras untuk wilayah Propinsi Jawa Barat, yang dalam 3 tahun terakhir (tahun 2009-2011) lebih 17 persen dari produksi nasional atau lebih dari 11 juta ton padi. Propinsi Jawa Timur yang dalam 3 tahun terakhir mencapai rata-rata lebih 11 juta ton atau 17 persen dari produksi nasional.

Propinsi Jawa Tengah yang mencapai 10 juta ton atau 15 persen dari produksi nasional, Propinsi Selatan mencapai lebih 4 juta ton atau 7 persen dari produksi nasional. Propinsi Sumatera Utara yang mencapai lebih 3 juta ton atau lebih dari 5 persen dari

produksi padi nasional. Propinsi Sumatera Selatan yang mencapai lebih 3 juta ton atau hampir 5 persen lebih dari produksi padi nasional, sedangkan Propinsi Lampung yang mencapai hampir 3 juta ton atau 4 persen dari produksi padi nasional.

Firman Soebagyo juga mengatakan bahwa komisi IV DPR mendukung sepenuhnya agar produksi padi di masing-masing propinsi dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan, hal yang lebih penting lagi para Gubernur harus bisa mencegah masuknya beras impor kewilayahnya, dan bisa mengutamakan produksi beras nasional dengan melakukan koordinasi antar Kepala Daerah Tingkat I dan II, Komisi

setujui pagu anggaran sebesar 17.607.059.923.905 rupiah dengan perincian untuk subsidi raskin sebesar 15.607.059.923.905 rupiah untuk 12 bulan sebanyak 17.488.007 RTS, de-



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo



Jajaran Pemerintahan dan Bulog

IV DPR juga akan mengambil tindakan tegas, bila dilakukan impor beras tanpa sepengetahuan dari Dewan.

Dia mengatakan bahwa Komisi IV DPR mengapresiasi hasil realisasi yang telah dicapai oleh Perum BULOG tahun 2011 yaitu pagu alokasi raskin sebesar 3.410.161 ton termasuk raskin ke 13 yang diberikan kepada 17.488.007 RTS, telah tersalurkan raskin sebanyak 3.364.742 ton atau 98,67 persen.

Untuk tahun 2012 telah di-

ngan HPB 6.558 rupiah/kg, harga jual 1.600 rupiah/kg, dan subsidi sebesar 4.958 rupiah/kg.

Dikatakan juga bahwa Perum BULOG harus mengantisipasi kenaikan harga beras dipasar, berkaitan penetapan harga pokok penjualan beras dan gabah petani yang dimungkinkan akan naik 28 persen. Sehingga hal ini tidak memberatkan rakyat miskin, dan harga beras di pasar relatif stabil. Ini sesuai tugas BULOG. (Spy)foto:parle

Komisi III Kecewa Langkah Hukum Impor Limbah B3 Lambat

Beberapa anggota Komisi III DPR RI menyatakan kekecewaan terhadap lambatnya penanganan kasus impor limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang berasal dari negara Belanda dan Inggris.



Tim Komisi III DPR RI saat meninjau kontainer berisi limbah B3 di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta

Menumpuknya 113 kontainer limbah selama 2 bulan, di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta dinilai karena lemahnya koordinasi diantara sesama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kementerian terkait, termasuk dengan Korwas (Koordinator Pengawas) PPNS Mabes Polri.

“Kok bisa panjang seperti ini interval waktu dari Januari sampai Februari padahal ada racun bermasalah. Sampai kapan racun bertahan terus kita diam saja. Saya melihat ada kerjasama yang kurang sinergi pada PPNS termasuk dengan Korwas Mabes Polri,” kata Aboe Bakar Alhabsy anggota Komisi III dari FPKS usai meninjau kontainer berisi limbah B3 di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, Jumat (10/2/12).

Hal senada disampaikan Taslim anggota Komisi III dari FPAN yang menyebut seharusnya 1 – 2 minggu setelah dipastikan ada limbah berbahaya, aparat segera bertindak mengembalikan. “Tidak perlu menunggu sampai 2 bulan, kalau bisa 1-2 minggu kenapa tidak. Harusnya begitu dibuka, dilihat ketahuan tidak sesuai, segera kirim ulang ke negara pengirim,” tandasnya.

Kunjungan spesifik ke Pelabuhan Kontainer Tanjung Priuk dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsudin. Tim meninjau keberadaan 113 kontainer didampingi oleh Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Agung Kuswondo. Dirjen secara khusus memperlihatkan isi 2 kontainer yang terdiri dari campuran barang bekas, besi, karet, aluminium berlumuran tanah dan cairan hitam pekat berbau tajam.

Bagi anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Syarifudin Sudding keberadaan limbah berbahaya ini di Indonesia bisa merupakan bentuk penghinaan. “Negara kita adalah negara berdaulat, sungguh terhina kalau negara berdaulat dikirim limbah, harkat martabat bangsa terhina melihat ini. Ini penghinaan terhadap bangsa, perlu ditindaklanjuti, siapa pengimpor dan siapa dibalik pengimpornya,” pungkaskannya.

Dalam penjelasannya Dirjen Bea Cukai menyebut kecurigaan terhadap 113 kontainer ini muncul setelah mengetahui ada perbedaan antara pemasok dengan pelabuhan pengiriman. Pemasok dari sebuah perusahaan di

Amerika Serikat sementara proses impor dari pelabuhan Belanda dan Inggris. Hasil pemeriksaan ternyata tidak sesuai dengan dokumen impor yang menyebut isi kontainer adalah steel scrap.

Penanganan kasus ini sudah dilakukan oleh PPNS Bea Cukai bekerja sama dengan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir). Hasilnya menunjukkan positif limbah B3 tetapi tidak ditemukan indikasi kandungan nuklir. Sejauh ini menurutnya proses hukum sedang berjalan. “Sesuai konvensi internasional, bila negara tertentu mendapat kiriman barang dan menganggapnya limbah aturannya dikirim kembali ke negara pengirim. Penyelesaian kasus ini bersamaan, proses penegakan hukum berjalan pengembalian juga berjalan,” ujar Agung.

Pimpinan Tim, Azis Syamsudin secara khusus menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea dan Cukai yang berhasil mengungkap impor limbah berbahaya ini. Kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priuk menurutnya merupakan hasil rapat pleno Komisi III untuk meminta keterangan resmi agar penanganan masalah bisa berjalan lancar.

“Kami ingin penuntusan limbah ini kembali ke negara pengirim, juga proses hukumnya termasuk pidana supaya tidak terjadi lagi kasus seperti ini di kemudian hari. Kami ingin koordinasi dari seluruh aparat hukum baik PPNS Bea Cukai, Lingkungan Hidup berjalan. Sehingga integrated legal sistem bisa terwujud. Termasuk bagaimana Pihak PPNS bisa berkoordinasi dengan Korwas Mabes Polri,” imbuhnya.

Ia mengaku mendapat input dari Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Bung Jono yang hadir dalam pertemuan tersebut bahwa koordinasi sejauh ini belum berjalan optimal. Politisi Partai Golkar ini menyebut saat ini Komisi III sedang menyiapkan naskah akademis RUU PPNS yang diharapkan dapat menyiapkan regulasi untuk menjawab tantangan kerja di lapangan. “Kita sedang siapkan naskah akademisnya, ini menjadi usul inisiatif Komisi III,” demikian Azis. (iky) foto:iw

Komisi V Dukung Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

Komisi V DPR RI mengapresiasi dan mendukung rencana induk perkeretaapian nasional 2010-2030 yang dipaparkan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dalam memajukan moda transportasi kereta api 20 tahun mendatang.

Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Direksi PT Industri Kereta Api (INKA), Selasa (7/2) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said.

Rencana induk yang disampaikan tersebut sangat baik ditengah-tengah sulitnya mengatasi kemacetan yang semakin parah dikota-kota besar dan rencana menjadikan moda kereta api sebagai salah satu alat transportasi unggulan.

Seperti disampaikan anggota F-PDI Perjuangan Sadarestuwati, yang memberikan penghargaan kepada PT KAI atas keberhasilannya mengubah pola operasi kereta api Jabodetabek menjadi single operation yang semula begitu banyak tantangan yang harus dihadapi ternyata hari ini sudah bisa berjalan dengan baik.

Estu memberikan dukungan PT KAI untuk bisa melakukan penanganan-penanganan yang lebih berani lagi untuk membuat transportasi kereta api lebih baik dan bisa menjadi solusi untuk memecahkan persoalan transportasi kita selama ini.

Ditambahkannya, memang seharusnya PT KAI menambah jumlah kereta api, bukan hanya di Jakarta tapi juga kota-kota lain yang saat ini sudah sangat parah kemacetannya. Menurutnya, masyarakat sudah seharusnya beralih yang selama ini mengandalkan transportasi roda dua atau mobil beralih ke kereta api.

“Saya yakin kalau ada penambahan gerbong-gerbong kereta commuter persoalan kemacetan dan persoalan masyarakat yang mengandalkan kendaraan bermotor akan dapat diatasi,” kata Estu.

Estu juga mengusulkan agar PT KAI



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said (kiri)

menambah kereta barang. “Jangan hanya kereta barang yang mengangkut batu bara saja, tapi perlu juga dipikirkan angkutan kereta api barang di Pulau Jawa,” tambahnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan, semakin terbatasnya kapasitas layanan jalan, moda kereta api semakin menunjukkan keunggulan kompetitifnya. Keunggulan ini tak lepas dari perkembangan teknologi perkeretaapian sehingga semakin cepat, aman, hemat energi dan ramah lingkungan. Selain itu dari sisi daya angkut kereta api tetap merupakan moda yang paling unggul.

Sejalan dengan prospek cerah perkeretaapian, sudah sewajarnya keunggulan-keunggulan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam penyelenggaraan transportasi nasional yang terintegrasi.

Untuk itu, kata Tundjung, penyelenggaraan perkeretaapian nasional di masa depan harus diwujudkan menjadi leading transportation mode khususnya sebagai pembentuk kerangka atau lintas utama transportasi nasional yang

mampu menjamin pergerakan orang dan barang di seluruh wilayah Indonesia.

Dirjen Perkeretaapian menyadari pentingnya menata kembali penyelenggaraan perkeretaapian nasional secara menyeluruh guna memastikan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian seperti diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Penyelenggaraan ini, dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) Tahun 2030.

Di dalam RIPNAS tersebut, kata Tundjung, telah memuat garis-garis besar kebijakan pembangunan perkeretaapian nasional antara lain memuat visi, arah, kebijakan, strategi, sasaran/target dan program utama pembangunan perkeretaapian dalam kurun waktu 2010-2030 (20 tahun mendatang).

RIPNAS ini, kata Tundjung, juga menetapkan 3 (tiga) arah pengembangan perkeretaapian nasional yaitu peningkatan pelayanan sarana dan prasarana, peningkatan teknologi perkeretaapian dan penyelenggaraan perkeretaapian yang mandiri dan berdaya saing. (tt) fot:wy/parle

Komisi X DPR RI Sepakat Majukan Olahraga Indonesia

Komisi X DPR RI sepakat untuk turut serta dalam mengembangkan proses kemajuan olahraga di Indonesia.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto saat menutup rapat kerja dengan Kemenpora, KONI, KOI, INASOC dan INASPOC di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/2)

Rapat kerja yang dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan jajarannya membahas evaluasi pelaksanaan SEA Games XXVI dan ASEAN Paragames 2011, pembahasan pembangunan Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, dan pembahasan sarana dan prasarana olahragainya.

Utut menyatakan hasil rapat kerja dengan Kemenpora ini akan terus ditindak lanjuti untuk kemajuan dan perkembangan olahraga Indonesia. "DPR sepakat untuk terus ikut mengembangkan proses kemajuan olahraga di Indonesia. Termasuk masalah evaluasi SEA Games dan Paragames serta pembangunan sekolah olahraga Hambalang yang selama ini sering dibicarakan. Ke depan Komisi

X akan terus mengawal semua proses yang terkait dengan perkembangan olahraga di Indonesia," katanya.

Atas nama Komisi X DPR RI, Utut memberikan apresiasi kepada pemerintah, KONI, KOI dan para pemangku kepentingan atas terselenggaranya SEA Games di Jakarta dan Palembang dengan meraih juara umum, dan terselenggaranya ASEAN Paragames VI di Solo dengan meraih juara ke dua. "Komisi X DPR RI bersama pemerintah sepakat bahwa prestasi SEA Games dan ASEAN Paragames harus dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Utut.

Komisi X DPR RI juga mendesak pemerintah untuk segera menyampaikan laporan pembiayaan penyelenggaraan SEA Games 2011 dan ASEAN Paragames kepada Komisi X DPR RI paling lambat pada akhir bulan Maret 2012.

Selain itu Komisi X DPR RI dan Kemenpora juga sepakat akan melakukan rapat kerja dengan mengikutsertakan Gubernur Sumatera Selatan dalam waktu dekat untuk membahas

rencana tindak lanjut penggunaan fasilitas olahraga di Jakabaring Palembang pasca pelaksanaan SEA Games.

Sementara untuk pengawasan terhadap pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Jawa Barat, Komisi X DPR RI dan pemerintah sepakat membentuk Panja Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Jawa Barat.

Pada rapat tersebut, Menpora Andi Mallarangeng menyampaikan penjelasan secara rinci mengenai evaluasi SEA Games, Paragames 2011 hingga proses pembangunan sekolah olahraga Hambalang, Jawa Barat. Menpora mengatakan, prestasi Indonesia baik di SEA Games dan Paragames membuahkan hasil yang baik dengan mendapatkan gelar juara umum dan runner up. Hanya memang ada beberapa pelaksanaan dari penyelenggaraan yang harus dievaluasi agar ke depannya lebih baik lagi.

"SEA Games ini adalah awal kebangkitan bagi olahraga kita, ke depan kita terus berpikir bagaimana cara mengembangkan olahraga kita lebih maju lagi. Beberapa cabang yang kurang berhasil, harus melakukan evaluasi diri dan berbenah agar ke depannya bisa lebih baik lagi. Mengenai penyelenggaraan, alhamdulillah bisa dikatakan berhasil, meskipun dibenturkan dengan kondisi yang serba mepet," kata Menpora.

"Jakabaring nanti akan digunakan sebagai pusat latihan di daerah Sumatera, bahkan kami sudah merancang universitas olahraga di Jakabaring. Kita sedang merancang institut olahraga yang memanfaatkan yang ada di Jakabaring dan Universitas Sriwijaya. Tinggal membangun gedung sekolah dan gedung administrasi. Dengan demikian tidak perlu keraguan Jakabaring akan terlantar sebagai tempat yang mati," tambahnya. (sc) foto: parle

DPR Minta Seluruh Elemen Dilibatkan Dalam Penuntasan Kasus GKI Yasmin

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung memberi penekanan penting agar perundingan melibatkan segenap unsur dan elemen masyarakat terkait.

“Rapat gabungan Komisi II, III dan VIII, DPR RI bersama dengan Pemerintah dan Ombudsman pada hari ini Rabu, 8 Februari 2012 terhadap permasalahan GKI Yasmin Bogor, memutuskan agar Pemerintah (pusat dan daerah) dalam waktu sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan secara tuntas dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat yang terkait demi terwujudnya kehidupan kemasyarakatan yang aman, tentram dan damai,” demikian Agun Gunanjar Sudarsa Ketua Komisi II yang diminta membacakan kesimpulan rapat yang berlangsung di Ruang KK I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Kesimpulan diambil setelah peserta rapat mendapat penjelasan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tentang perkembangan terakhir upaya mediasi yang dilakukan pemerintah. “Kami sudah beberapa kali membicarakan masalah ini dengan walikota Bogor beserta jajarannya, bertemu dengan unsur GKI Yasmin, bertemu tokoh lintas agama. Sekarang sebenarnya kita sudah hampir sampai pada titik-titik kesepakatan yang kita harap dapat terwujud dalam waktu dekat,” paparnya.

Ia menyebut persoalan GKI Yasmin bukanlah persoalan agama tetapi persoalan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan permasalahan ini mutlak kewenangan walikota. Namun karena persoalan berlarut-larut yang berlangsung sejak tahun 2005 pemerintah pusat menfasilitasi penyelesaian masalahnya.

Dalam rapat sempat terjadi perdebatan terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 127 PK/TUN/2009 tentang pencabutan pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja Yasmin yang dikeluarkan walikota. Namun sebagian anggota mengingatkan pasca

Rapat Kerja Gabungan Komisi II, III dan VIII dengan Menko Polhukam, Mendagri dan Menag yang membahas permasalahan pembangunan Gereja GKI Yasmin Bogor berakhir dengan kesimpulan mendesak pemerintah segera menuntaskan proses mediasi.

putusan MA telah keluar putusan Pengadilan Negeri Bogor yang memutuskan bersalah Ketua RT di wilayah Curug Mekar, Munir Karta terbukti memalsukan tanda tangan warga dalam pengurusan izin pembangunan gereja Yasmin.

“Yang kami inginkan persoalan ini terselesaikan, namun pemerintah tidak dapat ikut campur menyangkut persoalan hukum seperti eksekusi sebuah putusan, ini ranah aparat hukum,” jelas Mendagri.

Hujan Interupsi

Sebelumnya rapat sempat diwarnai hujan interupsi mempertanyakan status pertemuan yang dinyatakan pimpinan sidang sebagai Rapat Kerja Gabungan. “Sebenarnya ini rapat apa, dalam Tatib ketika kita melakukan rapat kerja itu adalah eksekutif dan legislatif. Kalau ada diluar itu rapat dirubah jadi RDPU. Waktu rapat dibuka, hanya ada satu ke-

lompok masyarakat yang kita undang dari GKI Yasmin, kemana masyarakat yang lain. Supaya kita tidak mengambil kesimpulan dari satu bagian cerita, saya mohon rapat ini ditunda,” ujar anggota Komisi VIII dari FPG Oheo Sinapoy.

Sementara itu anggota Komisi III dari FP3 Ahmad Yani mempertanyakan kebijakan membawa permasalahan GKI Yasmin ke dalam rapat kerja gabungan. “Kasus ini terlalu tinggi diangkat ke DPR karena ini sesungguhnya kasus lokal yang merupakan implikasi dari soal penerapan hukum semata. Kalau semua persoalan lokal kita tarik ke pusat ini tidak mendidik. Era sentralistik itu sudah berakhir. Sekarang era bagaimana daerah dapat menyelesaikan persoalan sendiri,” tandasnya.

Namun keberatan ini dibantah oleh anggota Komisi III dari FPDI Ahmad Basyarah yang menyebut keputusan membawa persoalan GKI Yasmin dalam rapat kerja gabungan merupakan hasil sidang paripurna. “Rapat gabungan



Rapat Kerja Gabungan Komisi II, III dan VIII dengan Menko Polhukam, Mendagri dan Menag yang membahas permasalahan pembangunan Gereja GKI Yasmin Bogor yang diwarnai dengan interupsi

sudah diputuskan pada rapat paripurna itu putusan tertinggi. Jadi forum ini pelaksanaan dari perintah paripurna,” tegasnya.

Anggota Komisi VIII dari FPD Baghowi kemudian mengusulkan solusi terkait keberadaan masyarakat dari GKI Yasmin sesuai Tatib pasal 238. “Seandainya rapat diteruskan saya pikir tidak masalah pihak gereja Yasmin posisinya

tidak seperti rapat kerja, tapi bisa berada dibalkon. Saya pikir itu tidak masalah,” imbuhnya. Pendapat ini didukung oleh anggota FPDIP Eva Kusuma Sundari “Kalau memang itu melegakan kita minta teman-teman GKI Yasmin di balkon lalu kita lanjutkan sesuai Tatib, rapat antara pemerintah dan komisi.”

Pimpinan sidang Pramono Anung kemudian segera mengambil keputu-

san. “Supaya tidak ada yang dibedakan satu dan lain hal tentang soal ini, supaya tidak ada masalah dalam penafsiran tatib, toh kita sedang mencari jalan keluar terbaik bagi persoalan yang ada, maka mohon teman GKI Yasmin dengan hormat untuk ke balkon,” kata Wakil Ketua DPR yang bidang Industri dan Pembangunan ini. (iky) foto:parle

DPR Soroti Keterlibatan Oknum Pejabat BI Terkait Century

Sejumlah anggota Dewan soroti keterlibatan oknum pejabat BI terkait kasus Bank Century. Hal tersebut mengemuka saat Tim Pengawas Century yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengadakan Raker dengan Jaksa Agung Basrief Arief, di Gedung DPR, Rabu, (8/2).



Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo (kiri) saat Rapat kerja Tim Pengawas Century DPR dengan Jaksa Agung Basrief Arief

“Mengapa hanya hasyam Al Warak dan Robert Tantular yang terkena tuduhan korupsi tanpa adanya peranan pejabat Bank Indonesia,” terang Bambang Soesatyo.

Menurut Bambang, Sampai 14 november tahun lalu, tidak terbukti adanya kerugian negara namun ketika kejaksaan dan penegak hukum

mengkait-kaitkan dengan kerugian negara baru terlihat. “Bank Indonesia telah melakukan pembiaran dan tidak melakukan pengawasannya. bahkan Miranda itu jelas melakukan pengawasan, begitu juga dengan Budi Mulya, karena itu kita harus melihat bahwa tindakan korupsi itu tidak berdiri sendiri,” jelasnya.

Bambang menambahkan, dirinya mengkritik pemerintah karena melibatkan Boediono sebagai ketua timnya, pasalnya dia diduga terlibat dalam kasus Bank Century.

Sementara Dolfie (F-PDIP) mempertanyakan, Kenapa Kejaksaan tidak memeriksa oknum pejabat BI yang bertanggung jawab di bidang pengawasan. “Terkait hasil audit BPK yang kedua banyak bicara aliran dana yang bisa terjadi adanya pencucian uang, Kenapa tidak ditelusuri aliran dananya ini,” jelasnya.

Disisi lain Achsanul Qosasih (F-PD) mengatakan, tim terpadu harus fokus dan komprehensif melawan para pelaku korupsi tersebut khususnya di tiga tempat Swiss, Hongkong maupun Inggris. “Yang utama pihak kejasaaan harus terus bekerja. Yang penting pengadil di Indonesia segera mencari aset sebesar Rp. 3.8 triliun. dan kita tahu Keberatan robert sudah ditolak kemudian dia telah mengajukan kasasi. Jika ini cara yang baik untuk negara jangan ditunda lagi proses hukumnya,” tambahnya. (si)/foto:IwanArmanias/Parle.

Parlemen Indonesia Dukung Negosiasi Perjanjian Indonesia-EFTA

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung negosiasi perjanjian Indonesia-Europen Free Trade Association (EFTA). Mengharapkan Komite Parlemen EFTA dapat berperan meningkatkan hubungan Indonesia dengan Negara-negara anggota EFTA dalam berbagai bidang, terutama politik dan ekonomi.



Pertemuan antara Parlemen Indonesia dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dengan Komite Parlemen EFTA di-pimpin Kathy Riklin

Dalam Pertemuan antara Parlemen Indonesia dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dengan Komite Parlemen EFTA di-pimpin Kathy Riklin, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (8/2).

Komisi Parlemen EFTA adalah forum untuk anggota parlemen dari empat Negara anggota, yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. Pada 7 Juli 2010, di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Konfederasi Swiss Madam Doris Leutherd selaku ketua Dewan EFTA, telah sepakat memberikan mandat kepada wakil-wakil mereka, untuk memulai negosiasi kerjasama kedua belah pihak sesegera mungkin. Diluncurkan negosiasi perjanjian Indonesia-EFTA Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IE-CEPA).

Parlemen Indonesia meminta Komisi Parlemen EFTA untuk mendorong pemerintahnya masing-masing agar negosiasi tersebut didasarkan atas dasar kesetaraan, saling meng-



hormati kedaulatan masing-masing, semangat untuk kepentingan bersama, memeperhatikan perbedaan tingkat pembangunan diantara kedua pihak, secara menyeluruh meliputi semua sector yang terkait perdagangan dan investasi dalam rangka yang terintegritas, termasuk di dalamnya kerjasama

peningkatan kapasitas.

“Kami mengharapkan agar Komisi Parlemen EFTA dapat menjadi salah satu institusi yang dapat membantu kerjasama ekonomi yang menguntungkan antara Indonesia dan Uni Eropa,” kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung. (as) Foto : Riska

Pemerintah Patut Tetapkan Penghasilan Minimal Bagi Guru

Konstitusi menyebut mencerdaskan bangsa adalah salah satu tujuan berdirinya negara ini. Upaya mencerdaskan itu sangat bergantung pada proses pendidikan dan tanggung jawabnya harus diambil oleh negara.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan pidato dalam acara pelantikan pengurus PB PGSI di Solo, Jateng

Lalai memberikan perhatian pada pendidikan akan menjadikan bangsa ini tetap terbelakang dan tidak punya martabat. Salah satu penentu keberhasilan pendidikan adalah pelaku pendidikan itu sendiri yaitu guru.

“Perhatian negara kepada pelaku pendidikan terutama guru sudah mulai membaik tapi masih ada yang terlewatkan, yaitu guru swasta. Aneh kalo guru swasta masih menerima penghasilan bulanan 200ribu, 300ribu, 500ribu. Aneh itu terjadi di negara Republik Indonesia ini. Padahal upah buruh saja sudah ada UMR-nya. Kok guru tidak ada penghasilan minimal?” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan pidato dalam acara pelantikan pengurus PB PGSI (Persatuan Guru Swasta Seluruh Indonesia) masa bakti 2011 – 2016 di Pendapa Gede, Balaikota Solo, Jateng, Sabtu (4/2/12).

Presiden SBY sejak tahun 2005 menurutnya sudah menyatakan guru adalah tenaga profesi bukan pekerja, salah satu instrumen pendukungnya adalah tunjangan profesi. Sejauh ini pemerintah sudah berhasil memberikan tunjangan tersebut kepada guru-

guru di sekolah negeri tapi belum di sekolah swasta. Padahal tugas guru negeri maupun swasta pada prinsipnya sama-sama memberikan pendidikan bagi anak bangsa. “Saya mendukung dan seharusnya PGSI memperjuangkan percepatan penetapan gaji minimal guru setelah itu tunjangan profesi,” imbuhnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengakui idealnya organisasi profesi harusnya hanya satu. Akan tetapi perjuangan PGRI sebagai salah satu organisasi yang ditua-kan belum mampu menyentuh kepentingan guru swasta. Kondisi itu akhirnya membuat para guru swasta terpecah pada beberapa organisasi seperti IGPSS (Ikatan Guru dan Pegawai Sekolah Swasta) dan Forum Guru Swasta. Ia berharap PGSI dapat menyatukan suara guru swasta dan pada saatnya dapat bergabung kembali dengan PGRI.

“Bila perlu pada saatnya nanti PGSI merger betul dengan PGRI, nanti bisa di-adakan wakil ketua guru negeri dan swasta. Bagi saya yang penting sekarang ini percepatan perbaikan nasib guru. Tidak usah dikedepankan ego. Bekerjalah dengan baik, beri perhatian

pada nasib anak-anak kita kedepan, kalau hanya kumpul-kumpul habis-kan duit, lebih baik bubar saja,” lanjut Marzuki yang didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina organisasi ini. Ia berharap kehadiran PGSI dapat jadi momen bangkitnya guru swasta di Indonesia.

Sementara itu Ketua Umum PGSI Muhammad Fatah dalam pidatonya usai pelantikan mengaku untuk dapat lancar menjalankan tugas mendidik anak bangsa, guru swasta memerlukan dukungan moril dan materil dari pemerintah dan DPR. “Tugas kami sama beratnya dengan guru negeri dalam membentuk karakter anak bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu ia menyampaikan rekomendasi hasil pertemuan guru swasta seluruh Indonesia yang meminta pemerintah mempercepat penyelesaian putusan terkait penghasilan minimal guru. “Kami berharap dalam 2 bulan yang akan datang pemerintah sudah dapat memutuskannya,” tandas Fatah disambut tepuk tangan perwakilan guru swasta yang memenuhi Pendapa. (iky) foto:tim parle

Tim Independen Laporkan Hasil Investigasi Runtuhnya Jembatan Kukar

Rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow ini menghadirkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang diwakili Wakil Menteri PU, Gubernur Kaltim, Kabareskrim Polri, Kapolda Kaltim, Kepala Basarnas, Bupati Kutai Kartanegara, Direksi PT Hutama Karya dan Direksi PT Perentjana Djaya.

Pada rapat sebelumnya tanggal 1 Desember 2011, yang mengundang mitra yang sama, salah satu kesimpulan rapat berbunyi : Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU untuk melakukan investigasi secara menyeluruh atas runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara dengan membentuk Tim Independen yang berasal dari para pakar bidang konstruksi khususnya konstruksi jembatan dari Perguruan Tinggi (antara lain ITB, ITS, UGM, UI), Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, dan Litbang PU serta menyampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja.

Atas dasar kesimpulan ini, Kementerian PU kemudian membentuk Tim Independen yang berasal dari beberapa perguruan tinggi ternama tersebut.

Wakil Menteri PU Hermanto Dardak dalam kesempatan ini mengatakan, urgensi pembentukan tim evaluasi dan investigasi atas runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara adalah untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dan independen penyebab runtuhnya jembatan tersebut sebagai acuan pengambilan kebijakan mencegah berulangnya kejadian serupa di masa datang.

Tim ini, kata Hermanto, telah melakukan kajian berdasarkan survey lapangan, mempelajari data-data/fakta-fakta perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, kronologi kerusakan struktur mulai dari kajian material jembatan, komponen struktur dan sistem sambungan jembatan.

Tim independen hari ini (Rabu 8/2) melaporkan hasil investigasi atas runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara yang terjadi pada 26 November 2011 lalu.

Tim Independen ini diminta menyampaikan hasilnya kepada komisi V DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tim ini dibentuk.



Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow (kanan)

Selain itu, Tim Investigasi ini juga melakukan wawancara dengan pihak perencana, pelaksana dan pemeliharaan termasuk kajian ahli dan tulisan media massa.

Temuan yang disampaikan Tim Investigasi, runtuhnya jembatan kukar antara lain disebabkan keruntuhan diperkirakan dipicu adanya tegangan tambahan yang terjadi saat pekerjaan pemeliharaan sedang berlangsung.

Penyebab lainnya, tegangan tambahan yang muncul pada saat dilakukan proses jacking di tengah bentang. Pertama-tama jacking dilakukan di sisi hilir hingga hanger memendek 15 cm (dalam 3 tahapan), kemudian dilanjutkan dengan sisi hulu.

Saat jacking di sisi hulu, sambungan antara batang hanger dan kabel utama putus. Putusnya sambungan ini

memicu keruntuhan jembatan secara total dalam waktu kurang dari 20 detik.

Hermanto menambahkan, dari temuan dan hasil evaluasi tersebut diperoleh kesimpulan kegagalan pada sistem sambungan antara batang hanger dan kabel utama pada dasarnya terjadi akibat akumulasi masalah sejak jembatan direncanakan.

Pekerjaan pemeliharaan yang tidak terjadwal dengan baik juga menjadi pemicu akhir runtuhnya jembatan. Pekerjaan pemeliharaan yang menurut informasi melibatkan pekerjaan jacking kemungkinan besar telah menimbulkan terjadinya kondisi tegangan yang melampaui kekuatan aktual material sambungan yang ada, yang mengalami pelemahan akibat fatik, fraktur, korosi dan stress concentration.

Mengingat tipe jembatan gantung yang khusus dan belum dikenal baik di Indonesia, dapat disimpulkan adanya kondisi lack of knowledge dari para pihak terkait. Seyogyanya, kondisi lack of knowledge ini perlu ditanggulangi dengan meminta masukan dan saran dari praktisi pakar ahli (bila perlu diundang dari luar).

Menurut Hermanto, kesimpulan lainnya mengatakan, banyak dijumpai penggunaan pendekatan-pendekatan yang oversimplified, yang menunjukkan adanya lack of knowledge terutama yang menyangkut pengetahuan tentang umur struktur, pemodelan geometri, sifat material, beban yang bekerja, keseimbangan dan kestabilan

struktur, desain dan detailing termasuk sambungan, pengaruh alam terutama korosi, kelelahan bahan, pengetahuan testing laboratorium komponen struktur dan pengetahuan tentang faktor pemeliharaan.

Sementara Ketua Tim Independen Iswadi Imran menyampaikan, Tim Independen yang beranggotakan 11 orang telah bekerja dan bertindak betul-betul secara independen untuk mencari penyebab runtuhnya jembatan tersebut dan jangan sampai tragedi itu terulang kembali.

Iswadi mengatakan, penyebab runtuhnya jembatan tersebut diantaranya kegagalan getas material sambungan, dimana ini terjadi akibat patah getas

geser. Indikasi fatigue dan fraktur juga terlihat pada elemen yang mengalami kegagalan.

Selain itu, kerusakan korosi juga teramati pada batang hanger. Hal ini disebabkan jembatan kurang terawat. Penyebab lainnya, tergesernya cable-cable di sisi Tenggara, kondisi kerusakan cable Splay di bagian hilir sisi Tenggara serta pergeseran pada dudukan Pyloon sisi Samarinda dan sisi Tenggara.

Iswadi mengatakan, Tim Independen mencari penyebab runtuhnya jembatan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, masa pakai bangunan, sampai pada perawatan. (tt) foto:wy/parle

Komisi X DPR RI Bentuk Panja Hambalang

Komisi X DPR RI dan pemerintah (Kementerian Pemuda dan Olahraga) sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Jawa Barat.



Anggota Komisi X DPR RI Djamal Aziz (kiri)

Panja Hambalang sepakat dibentuk pada saat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora Andi Malarangeng yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/2)

Anggota Komisi X DPR Djamal Aziz (F-PG) menyatakan bahwa pembentukan Panja proyek pembangunan Pu-

sat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat bertujuan mengetahui secara detil proyek tersebut.

“Saya pikir sangat tepat jika ini dipanjakan. Ada hal-hal yang aneh tapi nyata. Harus selesai tapi dengan jelas. Ini aneh konsultannya belum ada,” kata Djamal pada rapat kerja tersebut.

Menurut Djamal, berbagai pemberitaan yang menyebutkan adanya dugaan penyimpangan dalam proyek Hambalang ini, secara tidak langsung berimbas pada anggota komisi X DPR.

Selain Djamal, Anggota Komisi X lainnya Eko Hendro Purnomo (F-PAN) mendesak agar komisi X membentuk Panja untuk membuka apa yang terjadi dalam proyek Hambalang.

“Kita Panja-kan saja Hambalang ini, biar jelas apa masalahnya. Biar terang benderang,” kata Eko.

Anggota Komisi X DPR Memet Sosiawan (F-PS) justru mempertanyakan mengapa laporan penggunaan anggaran untuk proyek Hambalang yang dilaporkan Menpora tidak sama. Memet menyoroti laporan besaran anggaran yang telah diserap yang jika dihitung justru minus.

“Bagaimana ini angka tahun 2011 yg telah diserap hanya Rp594 miliar, tapi kalau saya hitung dari laporan yang ada jika ditotal baru Rp563 miliar, ini kok malah minus?,” kata Memet. (sc)/foto: Iwan Armanias/Parle.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PEMBERITAHUAN *PUBLIC HEARING*
PANJA RUU TENTANG PENYIARAN KOMISI I DPR RI
TERKAIT

PERUMUSAN PERUBAHAN UU NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, merupakan salah satu RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Tahun 2009 – 2014. RUU ini merupakan usul Inisiatif Komisi I DPR RI.

Agar Perubahan UU tentang Penyiaran dapat memberikan perlindungan kepentingan publik maupun *stakeholder* bidang penyiaran secara menyeluruh, maka Komisi I DPR mengundang partisipasi Lembaga, Institusi, Organisasi Profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (NGO) yang terkait bidang penyiaran, untuk memberikan saran dan masukan melalui *PUBLIC HEARING* yang akan dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 1 dan 8 Maret 2012
Jam : 10.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI,
Gd. Nusantara II lt. 1,
Kompl. DPR RI, Senayan - Jakarta

Bagi LSM atau lembaga yang ingin berpartisipasi, kami mohon untuk mendaftarkan diri paling lambat hari Senin, 20 Februari 2012 ke :

Sekretariat Komisi I DPR RI

Telp : (021) 5715 520, 5715 518,
Fax : (021) 5715 523,
e-mail : set_komisi1@dpr.go.id

Pimpinan Panja Penyiaran
Komisi I DPR RI


H. Hayono Isman, S.IP

A-450



Melalui Hari Pers, Kita Gugah Kepedulian Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Persaudaraan

Pers Merdeka Rakyat Punya Suara



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id